

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Anthony dan Pitt, Michael, 2000, Asset Valuation on Specialized Public Sector Listed Building by Depreciated Replacement Cost”, *Academic Papers: Asset Valuation*, Volume 18, pp.627-636.
- Arsyat, Indra Ayu R.A, 2014, Penilaian Aset Mess Itogapora Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014. *Tesis Tidak Diterbitkan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Budisusilo, Suyantoro, 2004, Diktat Kuliah Penilaian Aset Negara dan Aset Daerah, Magister Ekonomika Pembangunan UGM.
- Connellan, Owen, 1997, “*Valuation of Specialized Public Sector Assets*”, MCB University Press, *Journal of Property Management*, Volume 15, Number 4, page 215-225.
- Fauziah, Fitri, 2016, Penilaian Aset Tetap Gedung Mandala Wanita di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016. Program Pascasarjana MEP FEB UGM.
- French, Nick, 1994, “Asset Register and Asset Rents For Local Authorities: A Viable Property Management Tool”, MCB University Press, *Journal of Property Management*, Volume 12, Number 3, page 15-23.
- French, Nick dan Gabrielli, Laura, 2007, Practice Briefing Market Value and Depreciated Replecement Cost: Contradictory or Complementary?, *Journal of Property Investment and Finance* Volume. 25 Nomor. 5, pp.515-521
- Harto, 2006, Aplikasi Pendekatan Penilaian Properti Sebagai Estimasi Nilai Sewa Aset Daerah (Tanah dan Bangunan) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 (Studi Kasus : Aset Daerah Pada UPTD dan BP Pasar), *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UGM.
- Hidayati dan Hardjanto, 2015, *Konsep Dasar Penilaian Properti*, Edisi Revisi BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI 2007), Standar Penilaian Indonesia ( SPI ) Tahun 2007.
- KEPI dan SPI, 2015. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Jakarta.

- Layan, Letarius Erwyn, 2017. Penilaian Perumahan Dinas Pemerintah Daerah di Kelurahan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Marilela, Manea, dan Daniela, 2013. The Depreciated Replacement Cost Representation of Fair Value in Accounting, Tendencies and Perspectives in the Romanian Accounting Practice. *Journal of Performance and excellence in postdoctoral research in romanian economics science domain: "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi*. Volume 153. Halaman 550-556
- Nazir, Moh, 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prastowo, Andi, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Sarifudin, 2004, Transformasi Pengelolaan Aset Daerah (Tanah dan Bangunan) Dalam Optimalisasi Nilai Sewa di Kabupaten Sikka, *Tesis tidak diterbitkan*, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Young, Peter, 1994, "Market Valuation With No Market- Valuing Properties With Little Evidence", MBC University Press, *Journal of Property Valuation and Investment*, Volume 12 Number 3, page 9-27.

### **Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003  
Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  
Nomor 11 Tahun 2001 diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri  
Nomor : 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.